Utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke Pinrang Rp30 Miliar, Dana Transfer Triwulan I Tak Sesuai

TRIBUN-TIMUR.COM, PINRANG -- Pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp8 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulsel di Triwulan I 2025. Namun jumlah tersebut tidak sesuai seharusnya diterima. Pemkab Pinrang harusnya menerima dana transfer DBH Rp 5 miliar per bulan. Ditambah lagi, Pemprov Sulsel masih memiliki utang DBH sekira Rp 30 miliar ke Pemkab Pinrang di tahun 2024. "Ada masuk Rp 8 miliar (DBH). Nah ini saya mau memperjelas ke Kasda Provinsi, apakah yang baru ditransfer ini utang DBH tahun lalu atau tahun ini. Kalau Triwulan tahun ini harusnya juga Rp 15 miliar karena kita dapat Rp 5 miliar per bulan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Tjalo Kerrang saat dihubungi Tribun-Timur.com, Jumat (23/5/2025).

Andi Tjalo mengungkapkan, Pemprov belum membayar sisa DBH tahun 2024 lalu, yakni di periode Juli hingga Desember sebesar Rp 30 miliar. "Kalau DBH tahun lalu kan masih ada 6 bulan belum terbayarkan. Makanya kita mau perjelas itu, artinya sisa Rp 30 miliar (utang Pemprov)," ungkapnya. Dia mengutarakan, DBH sangat penting untuk menunjang pendapatan daerah Pinrang. Menurutnya, jika DBH tidak dibayarkan akan mengganggu program kegiatan daerah, kemudian daerah terancam ikut berutang dikarenakan pendapatan DBH sudah dimasukan dalam APBD 2025. "DBH ini sangat penting sekali karena ini kan masuk pendapatan berarti masuk program kegiatan. Kalau tidak dibayarkan akan mengganggu kegiatan yang sudah kita susun dan tidak sesuai estimasi yang dimasukan di APBD, pasti menjadi utang nantinya," jelasnya. "Misalnya, Rp 1 triliun pendapatan di APBD, kita sudah estimasi DBH Rp 30 miliar, artinya Rp 30 miliar jadi beban kita. Tapi saya konfirmasi dulu apakah yang baru ditransfer ini sisa DBH tahun lalu atau tahun ini," ucapnya.

Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman akhirnya menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Adapun total nilai mencapai Rp 222 miliar ditransfer ke 24 kabupaten/kota se-Sulsel"Kita telah melakukan efisiensi, realokasi dan alhamdulillah hasilnya termasuk tambahan dana belanja prioritas baik pusat maupun provinsi serta tambahan DBH 2024/2025" ujar Andi Sudirman Sulaiman pada Selasa (20/5/2025). Penyerahan alokasi DBH ini diharapkan dapat memperkuat fiskal daerah. Lebih jauh, mempercepat implementasi program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya penggunaan dana ini secara efektif dan efisien. Kemudian berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. "Penyaluran DBH ini adalah bentuk sinergi dan dukungan kami kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Kami berharap dana ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi prioritas kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Lebih lanjut, Andi Sudirman juga mengingatkan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah provinsi disebutnya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan DBH ini. Sebab Pemprov harus memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sementara untuk utang DBH tahun 2024, Andi Sudirman berjanji tetap akan membayarkan. Hanya saja pelunasannya dilakukan secara bertahap ke daerah-daerah "Kita akan mengupayakan untuk bisa mempercepat lagi pencairan untuk triwulan kedua tahun 2025 dan secara bertahap untuk DBH tahun 2024 yang belum dilaksanakan" tutupnya. (*)